

- a) Menginput data kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen dan melakukan penelitian ulang identitas kendaraan bermotor dan pemilik.
- b) Penelitian ulang data kendaraan bermotor yang telah diinput ke komputer dan selanjutnya *print notice*.

d. Korektor Notice

Menyerahkan *notice* kepada wajib pajak dan meminta kepada wajib pajak agar meneliti identitas yang tertera pada *notice*.

e. Pengeluaran STNK

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berkembang sejalan dengan dengan kemajuan teknologi, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor KPPD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui bank BRI, bahkan dapat juga melakukan "pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *on line*" yaitu di KPPD/Samsat manapun di Provinsi Yogyakarta. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat memperoleh informasi tentang identitas kendaraan dan besaran nominal pajak kendaraan bermotor melalui layanan SMS 9600.

2. Kendala yang menghambat proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Dalam mengantisipasi perkembangan jumlah obyek kendaraan

bermotor yang cukup pesat memang kurang diimbangi dengan

penyediaan tempat pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor.

- b. Munculnya kelemahan dalam sistim on line melalui perbankan adalah dimana wajib pajak setelah membayar pajak kendaraan bermotor via bank yang ditunjuk tetap harus melaksanakan pengesahan di KPPD/Samsat setempat.
- c. Terjadinya perbedaan data yang ada di Super KPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di KPPD / Samsat, menunjukkan kurang profesionalnya sumber daya manusia yang ada khususnya petugas dibagian pendaftaran dan supervisi serta masih diperlukan penyempurnaan program komputer di KPPD / Samsat Kota Yogyakarta.

B. Saran.

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak–pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (KPPD) / Samsat Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya menghilangkan SPPKB (Surat

Pajak/STNK dibuat sedemikian rupa sehingga wajib pajak tidak perlu repot dalam pembayaran PKB. Secara prinsip yang penting Pajak terpenuhi dan kendaraan jelas kepemilikannya serta kendaraan tersebut sah untuk dipergunakan di jalan raya. Kecuali untuk kendaraan – kendaraan baru dan kendaraan yang belum terdaftar di KPPD/Samsat memang perlu untuk identifikasi data awal kepemilikan dan identifikasi kendaraan.

2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor KPPD / Samsat, kiranya perlu untuk dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukkan / antrian yang terlalu banyak. Disamping itu diharapkan Instansi terkait dalam Samsat baik dari KPPD, Polri maupun dari Jasa Raharja, diharapkan menyatukan visi dan persepsi melalui peningkatan koordinasi, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak tidak terlihat adanya arogansi sektoral dan dengan sendirinya akan tercipta pelayanan publik yang profesional, mudah, murat, cepat dan akurat.
3. Kondisi tempat pelayanan KPPD/Samsat yang kurang memadai dan rencana pembangunan gedung baru hendaknya dilakukan melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah tempat pelayanan yang betul – betul sesuai dengan harapan wajib pajak dan juga sesuai dengan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Yogyakarta.

4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan pengembangan terhadap

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dicapai secara maksimal. Sebagai contoh adalah perlu adanya pemikiran tentang bagaimana wajib pajak dapat membayar PKB dan mengurus pengesahan STNK cukup hanya melalui ATM, dan tidak perlu datang untuk pengesahan di KPPD/Samsat.

5. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di KPPD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak